

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai Negara yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan menjadikan negara ini salah satu negara yang dunia maritimnya paling berkembang pesat, hal tersebut dapat dilihat makin ramainya lalu lintas pelayaran Internasional baik kapal yang masuk ke Indonesia maupun ke luar Indonesia tidak hanya itu saja pelayaran nasional dan lokal juga tidak kalah berkembangnya kini banyak sekali kapal – kapal yang melakukan pelayaran untuk menuju ke berbagai pulau baik jenis kapal barang maupun kapal penumpang.

Pertumbuhan dunia maritim memang dirasa sangatlah bagus karena dengan berkembangnya dunia maritim di Indonesia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan laut merupakan media paling penting dalam kegiatan ekspor impor jadi bisa dikatakan pelabuhan merupakan pintu gerbang suatu negara.

Dunia pelayaran memang sangatlah luas tidak hanya perpindah kapal dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain, tetapi masih banyak lagi seperti Hidrografi, Penjagaan pantai, ekspor impor, Perdagangan, Kenavigasian dan lain – lain.

Sebagai negara kepulauan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Negara Kepulauan (*Archipelagu State*) oleh konfensi PBB yang diakui oleh dunia Internasional maka Indonesia mempunyai kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut Indonesia. Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis di antara Benua Asia dan Benua Australia. Peranan laut sangat penting sebagai pemersatu bangsa serta wilayah Indonesia dan konsekwensinya. Pemerintah berkewajiban atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang penegakan hukum baik terhadap ancaman

pelanggaran terhadap pemanfaatan perairan serta menjaga dan menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Laut sebagai jalur komunikasi (*sea lane on communication*) diartikan bahwa pemanfaatan laut untuk kepentingan lalu – lintas pelayaran antar pulau, antar negara maupun antar benua baik untuk angkutan penumpang maupun barang, maka perlu ditentukan alur perlintasan laut kepulauan Indonesia bagi kepentingan pelayaran lokal maupun Internasional serta fasilitas keselamatan pelayaran seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), telekomunikasi pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Bengkel Kenavigasian, *Survey Hidrografi* untuk menentukan alur pelayaran yang aman serta infrastruktur lainnya. Pengatur alur lalu – lintas dan perambuannya guna kelancaran dan keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab pemerintah dan kita bersama sebagai penguasa, pengelola, serta pengguna atas laut.

Sesuai dengan UU Nomor 17 tentang Pelayaran bahwa Saran Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal atau lalu lintas kapal. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dari lalu lintas kapal.

Segala kegiatan kenavigasian di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Distrik Navigasi. Distrik Navigasi sendiri merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan di Semarang sendiri kenavigasian dilaksanakan oleh Distrik Navigasi Kelas II Semarang.

Distrik Navigasi Kelas II Semarang yang merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut melaksanakan kegiatan kenavigasian yang meliputi pengoperasian pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran untuk kepentingan keselamatan pelayaran. Kegiatan kenavigasian yang dijalankan oleh Distrik Navigasi Kelas II Semarang dalam memberikan pelayanan navigasi bagi kapal – kapal

yang keluar masuk alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang memang sangatlah penting karena kegiatan kenavigasian tersebut untuk menjamin keselamatan pelayaran. Fungsi dari Perawatan sarana bantu milik Distrik Kelas II Semarang adalah untuk meningkatkan efisiensi bernavigasi kapal dan lalu- lintas kapal, sehingga keselamatan dan keamanan angkutan serta perlindungan maritim terlaksana dengan baik.

Seperti kita ketahui di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang merupakan salah satu pelabuhan yang paling ramai lalu – lintas pelayarannya.

Dan karena itulah penulis dalam menyusun Karya Tulis ini mengambil Judul : “PROSEDUR PEMASANGAN DAN PERAWATAN SARANA BANTU NAVIGASI DI WILAYAH KERJA DISTRIK NAVIGASI KELAS II SEMARANG”.

Penulis melakukan penelitian secara langsung pada saat melakukan praktek darat dikantor DISTRIK NAVIGASI KELAS II SEMARANG.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa manfaat Pemasangan dan Perawatan Sarana Bantu Navigasi di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Kelas II Semarang?
2. Bagaimana proses pemasangan sarana bantu navigasi di wilayah Distrik Navigasi Kelas II Semarang?
3. Hal apa yang menjadi prioritas utama dalam Perawatan Sarana Bantu Navigasi di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Kelas II Semarang?
4. Masalah – masalah apa yang dihadapi dalam upaya Pemasangan dan Perawatan Sarana Bantu Navigasi di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Kelas II Semarang?

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN

1. Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis akan menerapkan teori yang di

dapat di bangku perkuliahan, studi perpustakaan, dan studi dokumen yang ditemukan langsung dalam pelaksanaan praktek darat (prada) yang dilakukan. Penulisan karya tulis ini mempunyai beberapa tujuan. Disamping di jadikan sebagai tugas Akademi serta dapat di gunakan sebagai pengetahuan secara umum dan terlebih khusus tentang Prosedur Pemasangan dan Perawatan Sarana Bantu Navigasi di DISTRIK NAVIGASI KELAS II SEMARANG sehingga penulis ini bertujuan :

- a. Manfaat dari pemasangan dan perawatan sarana bantu navigasi di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas II Semarang adalah untuk memberikan kemudahan untuk kapal – kapal yang berada di Tanjung Emas Semarang dan juga menjaga dan merawat sarana bantu navigasi agar selalu dapat berfungsi dengan semestinya.
- b. Proses pemasangan Pemasangan SBNP harus dilaksanakan dengan mengikuti atau berpedoman pada beberapa peraturan hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Adapun beberapa Peraturan dan Perundangan yang menjadi rujukan antaralain:
 - 1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian.
 - 2) Peraturan Menteri (PM) N0.25 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
- c. Hal pokok utama dalam perawatan sarana bantu navigasi di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas II Semarang adalah selalu memeriksa kondisi sarana bantu navigasi di wilayah Distrik Navigasi Kelas II Semarang agar tidak terjadinya adanya kerusakan yang timbul sewaktu – waktu.
- d. Masalah yang dihadapi dalam upaya pemasangan dan perawatan sarana

bantu navigasi di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas II Semarang adalah terjadinya kerusakan pada alat pemasangan dan perawatan sarana bantu navigasi.

2. Tujuan Penulisan

1. Bagi Distrik Navigasi Kelas II Semarang

2. Bagi *civitas* STIMART “AMNI” SEMARANG

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana cara agar dapat mudah memasuki alur pelayaran di Tanjung Emas Semarang. Dan memberikan pelayanan bernavigasi yang aman dan terhindar dari bahaya navigasi maupun bahaya-bahaya yang timbul selama kapal berlayar di daerah alur pelayaran pelabuhan, hal ini disebabkan karena alur pelayaran pelabuhan, hal ini disebabkan karena alur pelayaran pelabuhan tersebut tidak terlalu luas.

3. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan bagi para pembaca, Dapat Meningkatkan Kualitas Memori, Melatih Ketrampilan untuk Berfikir dan Menganalisa, Dapat Memperluas Pemikiran Seseorang.

4. Manfaat bagi penulis

Memperluas pengetahuan, Memberikan pengetahuan pada para pembacanya, Melatih komunikasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Karya tulis ilmiah ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang terdiri tinjauan pustaka dan gambaran umum objek penelitian.

Bab III Metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil dan pembahasan yang mana membahas mengenai rumusan masalah.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.